

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Mobilisan yang memasuki daerah perkotaan di Kecamatan Dayeuhkolot adalah mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hampir seluruhnya mobilisan adalah laki-laki yang berada pada usia produktif antara usia 16-59 tahun. Meskipun terdapat kaum wanita yang menjadi buruh pabrik namun kaum laki-laki tetap menjadi mobilisan yang paling banyak melakukan mobilitas ulang-alik. Hal ini disebabkan beban tanggungan laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisan tersebut datang dari berbagai daerah dari wilayah-wilayah luar kecamatan yang berdekatan dengan daerah tujuan. Sebagian besar mobilisan datang dari daerah Baleendah, daerah yang strategis karena wilayah ini langsung berbatasan dengan Kecamatan Dayeuhkolot. Faktor jarak sangat mempengaruhi pemilihan daerah tujuan mobilisan untuk dijadikan tempat berusaha.

Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana jalan dan transportasi yang baik, mudah, dan lengkap sangat mendukung kelancaran dan kenyamanan bagi

mobilisan dalam mencapai daerah tujuan. Walaupun terdapat beberapa kendala yang menghambat yaitu kemacetan yang selalu rutin terjadi watu pagi dan sore hari saat masuk dan keluarnya jam kerja.

Umumnya mobilisan buruh pabrik dan pedagang kaki lima yang berasal dari masing-masing daerah asal memiliki perbedaan cara dalam menutupi kekurangan kebutuhan hidup. Mobilisan buruh pabrik yang berasal dari Baleendah lebih cenderung mengurangi pengeluaran dalam meminimalisir pengeluaran dari pendapatan yang diperolehnya. Sedangkan mobilisan pedagang kaki lima yang berasal dari Baleendah juga berupaya untuk menambah jam kerja.

Adapun pendapatan yang diperoleh oleh mobilisan buruh pabrik dan pedagang kaki lima sangat beragam. Bagi buruh pabrik hampir sebesar 78% berpenghasilan antara Rp 500.000-Rp 1.000.000. Pada jumlah penghasilan yang sama pun diperoleh oleh mobilisan pedagang kaki lima yaitu sebesar 70%. Sedangkan 30% mobilisan pedagang kaki lima memiliki penghasilan terkecil yaitu < Rp 500.000. Meskipun kedudukan mereka sebagai pekerja yang memiliki pendapatan rendah, perolehan pendapatan bagi buruh pabrik ditentukan oleh Upah Minimum Regional (UMR), sehingga dengan ditetapkannya penghasilan tersebut seolah-olah mereka harus berupaya mencukupi segala kebutuhannya sesuai penghasilan yang diperolehnya.

Begitu pula bagi pedagang informal seperti PKL, tidak ada besaran UMR yang mengatur perolehan pendapatannya. Pekerjaan yang tidak terpaut masa kerja dan jam kerja, memaksa mereka harus terus berusaha menambah jam kerja demi mendapatkan penghasilan dan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun, sejak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, telah menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok semakin tinggi padahal seperti yang kita ketahui bahwa biaya hidup di kota sangat tinggi. Begitu pun dengan penghasilan yang diperolehnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya karena banyaknya beban tanggungan hidup dan pengeluaran lainnya.

Oleh karena itu, mereka kaum mobilisan ulang-alik buruh pabrik yaitu sebesar 66% berupaya menutupi kekurangan tersebut dengan mengurangi pengeluaran, sedangkan sebesar 60% mobilisan pedagang kaki lima berupaya menutupi kekurangan kebutuhan hidupnya dengan menambah jam kerja. Setelah diuji melalui uji statistik chi-square ternyata diketahui chi-square hitung adalah 37.863 dan chi-square tabel 7.815 pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (df) = 3, maka chi-square hitung > chi-square tabel. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan cara yang dilakukan antara mobilisan buruh pabrik dan pedagang kaki lima dalam menutupi kekurangan kebutuhan hidup.

Mobilisan yang bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang kaki lima menunjukkan bahwa mobilisan buruh pabrik jauh lebih berkecukupan dan sejahtera jika dibandingkan dengan pedagang kaki lima. Ada pun hal-hal lain selain pendapatan, pendidikan, jenis pekerjaan, jarak, beban tanggungan keluarga, pola makan pun merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa mobilisan buruh pabrik memiliki penghidupan yang jauh lebih baik dibandingkan mobilisan yang bekerja sebagai pedagang kaki lima.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai cara pemenuhan kebutuhan penduduk mobilisan ulang-alik di Kecamatan Dayeuhkolot, penulis mengemukakan rekomendasi atau saran-saran untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi serta jumlah penduduk usia produktif yang semakin banyak. Alangkah bijaknya jika pemerintah mencoba mencermati dan mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kurang seimbangnya lapangan pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja, serta keterbatasan dan ketidakmerataan dalam penyediaan dan penyerapan lapangan kerja bagi penduduk yang berada di desa dan perkotaan.
2. Pemerintah hendaknya memperhatikan kesejahteraan buruh pabrik sebagai penggerak kemajuan perekonomian bangsa, melalui peningkatan gaji dan upah yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat bawah dan mengubah gaya hidup. Peningkatan upah minimum regional (UMR) yang sesuai dengan standar hidup layak. Mengingat bahwa akhir-akhir ini harga-harga kebutuhan pokok semakin tinggi.
3. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh adanya mobilitas ulang-alik di Kecamatan Dayeuhkolot sangat terasa secara emosional pada dampak negatif yang dihasilkan oleh kemacetan yang mengganggu kelancaran berlalu lintas. Ketidakteraturan kendaraan saat bersamaan dengan keluar masuknya jam kerja menyebabkan kemacetan panjang. Mohon diperhatikan agar

pengguna jalan lainnya yang melintas ke Kecamatan Dayeuhkolot untuk tertib demi kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas.

4. Dalam perencanaan kota, perlu ditentukan apakah PKL lambat laun dikurangi atau dipertahankan menjadi ciri khas kota-kota di Indonesia. Apabila PKL lambat laun dikurangi maka strategi untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemacetan lalu lintas harus menjadi pilihan, seperti peningkatan pendidikan masyarakat, memperbanyak sektor formal yang memenuhi syarat lingkungan dan meningkatkan UMK (Upah Minimum Kabupaten) sehingga akan mengurangi kesenjangan kegiatan PKL.
5. Untuk kemajuan tingkat perekonomian pedagang informal seperti PKL. Diharapkan pemerintah dapat mencari solusi untuk menertibkan PKL yang berkeliaran di sepanjang jalan. Sehingga dengan disediakannya suatu tempat untuk relokasi para PKL supaya terkoordinasi dengan baik. Dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
6. Masyarakat diperkenalkan pada *Public Education* untuk lebih mengenal etika, yaitu dengan menetapkan ketentuan dan pemeliharaan ruang publik. Pengarahan pemeliharaan lingkungan ruang publik untuk menumbuhkan persepsi yang sama tentang ruang publik yang ideal yang perlu dipelihara bersama. Kemudian dapat dilakukan tindak lanjut dengan memberikan sanksi/teguran bagi yang melanggar/membuat kekumuhan ruang publik. Begitu pula bagi yang melanggar penggunaan ruang publik, kerapian PKL dalam menempatkan sarana usaha.